



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHYADI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 67905

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.452.595.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1014 m²/144 m² di KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 619.080.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 458 m²/229 m² di KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 697.515.000
3. Tanah Seluas 1600 m² di KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 45.000.000

1. MOBIL, KIA PICANTO MINI BUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 122.703.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 76.149.613

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.696.447.613

III. HUTANG

Rp. 169.658.438

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.526.789.175

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.